

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Runtuhnya ekonomi Indonesia sudah terlihat sejak terpuruknya nilai rupiah sebelum puncak krisis moneter pada pertengahan tahun 1997, adalah akibat sentralisme kekuasaan, termasuk dalam membuat keputusan-keputusan ekonomi. Krisis ekonomi yang puncaknya terjadi pada tahun 1998, tentunya membawa berbagai macam dampak serta perubahan-perubahan di Negara ini.

Perubahan sistem pemerintahan merupakan salah satu perubahan yang mendasar untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Pada tahun 1999, telah ditetapkan undang-undang tentang Otonomi Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Saat ini, undang-undang Otonomi Daerah telah diperbarui dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang mengandung inti dari konsep otonomi daerah yaitu upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah luas. Dengan demikian tuntutan masyarakat dapat terwujud secara nyata

dan penerapan otonomi daerah luas dan kelangsungan pelayanan umum tidak diabaikan, serta memiliki kesinambungan fiskal secara nasional.

Daerah otonom selain mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri juga berwenang menarik berbagai jenis pajak dan retribusi yang terdapat didaerah tersebut, sehingga dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Untuk mendukung kemampuan ekonomi daerah dalam era otonomi dituntut kesiapan daerah untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya ekonomi yang dimiliki serta pemberdayaan potensi daerah seoptimal mungkin, guna menentukan serta menetapkan rencana pembangunan daerahnya. Dalam kapasitas yang demikian maka diperlukan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu komponen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dukungan kebijakan Pemerintah Daerah agar pelaksanaannya menjadi terarah dan terpadu.

Dari sisi pemerintahan daerah, dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut sumber penerimaan keuangan daerah berasal dari salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan penerimaan yang lain adalah dana perimbangan, pinjaman daerah dan penerimaan yang sah. Pendapatan asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah.

Kabupaten Gunungkidul, sebagai salah satu daerah otonom, melalui otonomi tersebut diharapkan pemerintahnya akan lebih mandiri baik fiskal untuk membiayai pembangunan maupun di dalam membenahi manajemen pemerintahan termasuk aparturnya, dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu banyak campur tangan dalam mengatur daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul harus mampu memainkan perannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan anggaran belanja daerah secara ekonomi yang wajar, efisien, efektif, dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pemerintah atasannya maupun kepada publik atau masyarakat.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan dua variabel terpenting yang membentuk PAD suatu daerah. Di Kabupaten Gunungkidul penerimaan retribusi daerah lebih besar dari penerimaan pajak daerah. Dan dari berbagai macam pendapatan dari retribusi yang dipungut yaitu ; retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu, retribusi terminal di Kabupaten Gunungkidul menjadi sumber pendapatan yang cukup berarti bagi Pemerintah Daerah.

Di Kabupaten Gunungkidul, retribusi terminal merupakan sumber penerimaan yang potensial dalam retribusi daerah dan apabila dimaksimalkan akan mampu mendorong kenaikan PAD. Dengan kondisi geografis Kabupaten Gunungkidul adalah perbukitan dan penduduknya menyebar jauh dari pusat

ekonomi daerah, maka mobilitas penduduk dirasa sangat penting dalam aktivitas kegiatan ekonomi penduduknya. Pengukuran pendapatan dari adanya mobilitas tersebut dapat diukur melalui penerimaan retribusi terminal Kabupaten Gunungkidul.

Dari data yang sudah ada terlihat bahwa realisasi penerimaan retribusi terminal cenderung lebih besar dari target yang telah direncanakan kecuali pada tahun anggaran 1999/2000 hal itu disebabkan dari dampak krisis ekonomi yang puncaknya terjadi pada tahun 1998, perhitungan tahun fiskal menjadi tahun kalender dan pada tahun 2003 yang dikarenakan dampak kenaikan BBM sehingga banyak angkutan yang berhenti beroperasi. Perkembangan penerimaan retribusi terminal dan PAD selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Penerimaan Retribusi Terminal dan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 1999-2003

Tahun Anggaran	Target Retribusi Terminal	Realisasi Retribusi Terminal	Pendapatan Asli Daerah
1999/2000	59.688.000,00	55.266.000,00	5.409.513.105,45
2000	44.766.000,00	45.091.600,00	5.719.379.104,90
2001	65.664.000,00	66.415.100,00	8.852.286.282,60
2002	72.900.000,00	74.626.400,00	13.486.859.839,85
2003	96.860.000,00	91.949.500,00	17.481.692.174,84

Sumber data : BKD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003

Penerimaan daerah dari retribusi harus terus ditingkatkan sebagai sumber yang kontribusinya cukup berpotensi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun dalam usaha peningkatan tersebut tentunya terdapat adanya berbagai hambatan. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, maka diperlukan kerjasama antara pihak pemerintah daerah dengan instansi lain yang terkait dan yang terpenting adalah dari masyarakat Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan latar belakang dan pemikiran masalah tersebut, maka penulis tertarik pada retribusi terminal sebagai obyek penelitian dengan judul “ANALISIS KONTRIBUSI RETRIBUSI TERMINAL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 1999-2003”

1.2 Rumusan Masalah

Mengingat begitu luasnya topik penelitian dan berbagai batasan yang menjadi kesempurnaan penelitian itu, juga berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis memfokuskan penelitian ini dengan melihat peranan, aktivitas, dan permasalahan retribusi terminal di Kabupaten Gunungkidul. Penulis merumuskan masalah yang berkaitan dengan retribusi terminal di Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

- a. Seberapa besar kontribusi Retribusi Terminal terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul?

- b. Seberapa besar tingkat upaya pemungutan Retribusi terminal Kabupaten Gunungkidul?
- c. Bagaimana efektifitas Retribusi Terminal Kabupaten Gunungkidul?
- d. Bagaimana efisiensi Retribusi Terminal Kabupaten Gunungkidul?
- e. Bagaimana perkembangan penerimaan Retribusi Terminal Kabupaten Gunungkidul pada tahun berikutnya atau pada masa yang akan datang?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui berapa besar kontribusi Retribusi Terminal terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul.
- b. Untuk mengetahui berapa besar upaya pemungutan Retribusi Terminal Kabupaten Gunungkidul.
- c. Untuk mengetahui efektifitas Retribusi Terminal kabupaten Gunungkidul.
- d. Untuk mengetahui efisiensi Retribusi Terminal Kabupaten Gunungkidul.
- e. Untuk mengetahui perkembangan penerimaan Retribusi Terminal Kabupaten Gunungkidul dimasa yang akan datang, sehingga dapat

dihitung jumlah target penerimaan Retribusi Terminal yang akan ditetapkan pada tahun berikutnya.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terutama:

- a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam menilai kinerja pemungutan retribusi terminal dan upaya-upaya peningkatan PAD.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam mengambil kebijakan pemungutan retribusi dan peranannya dalam peningkatan PAD.
- c. Sebagai salah satu sumber informasi yang dapat memberikan gambaran dan kemudahan bagi penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari enam bab, setiap bab dapat dirinci ke dalam sub-sub bab yang relevan dengan pembahasan bab. Secara garis besar, terdiri dari bab dengan urutan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan Latar Belakang Masalah penulisan skripsi ini, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Bab ini akan membahas tentang Struktur dan Karakteristik Fisik Dasar, Keadaan Sosial Kependudukan, Keadaan Ekonomi, Badan Keuangan Daerah (BKD), Sistem Jaringan Jalan dan Jasa Transportasi, Dinas Perhubungan.

BAB III. TELAAH PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Dimana hasil penelitian tersebut menjadi acuan untuk penelitian berikutnya khususnya penelitian ini.

BAB IV. LANDASAN HUKUM DAN TEORI

Bab ini membahas tentang Sumber-sumber Pendapatan Daerah, Retribusi Daerah, Ketentuan Umum Retribusi Daerah, Kinerja Pungutan Retribusi Daerah, Retribusi Terminal.

BAB V. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dan metode analisis untuk memperoleh jawaban dari masalah yang telah dirumuskan.

BAB VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang Analisis Data, Penerimaan PAD dan Retribusi Terminal, Kontribusi Retribusi Terminal Terhadap Pendapatan Asli Daerah, Upaya Pemungutan Retribusi, Efektifitas Retribusi Terminal dan Efisiensi Retribusi Terminal serta Analisis Perkiraan Penerimaan Retribusi Terminal di Kabupaten Gunungkidul di masa yang akan datang.

BAB VII. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari penelitian dan implikasi kebijakan yang dasarankan.

